



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU SAMSUL HILAL
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 779693

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 892.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/132 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 292.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/70 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPM Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA E Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 192.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.876.249**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.234.776.249



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.234.776.249

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.